



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, Nomor handphone: -, dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, Nomor handphone: -, dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara e-court dalam register perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph tertanggal 19 Agustus 2024, telah mengajukan

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juli 2002 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak I, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir -, pendidikan tamat SMA;
 - b. Anak II, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP;
 - c. Anak III, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak II, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, pekerjaan belum bekerja
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di Peraduan Binjai, 29 Desember 2004, pendidikan tamat SD, pekerjaan belum bekerja, alamat -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa, anak pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 1 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah 1 tahun lebih menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Anak II dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) tidak dapat ditunda lagi karena telah melakukan hubungan suami istri atas pengakuan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 minggu sebagaimana Surat Keterangan Hamil Nomor: - yang dikeluarkan oleh Puskesmas - pada tanggal 16 Agustus 2024;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 1 bulan;
9. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : - Perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 16 Agustus 2024;
10. Bahwa calon suaminya dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur yakni berumur 19 tahun 8 bulan;
11. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mendapatkan konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam surat rekomendasi tanggal 20 Agustus 2024;
12. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Dokter Nomor: - yang dikeluarkan oleh Blud UPT Puskesmas Rawat Inap - pada tanggal 16 Agustus 2024;

13. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama Anak II dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) untuk melaksanakan pernikahan ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas penjelasan Hakim, para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik ;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Para Pemohon:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak II dengan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) karena hubungan asmara antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Anak II saat ini berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dan calon suaminya sudah berjalan sedemikian lama dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil akibat hubungan diluar perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Orang tua calon suami anak para Pemohon:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak II dengan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) karena hubungan asmara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) saat ini berusia 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dan anak para Pemohon sudah berjalan sedemikian lama dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil akibat hubungan diluar perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan anak para Pemohon;

Anak para Pemohon:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak II, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini dalam kondisi hamil akibat hubungan diluar perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah terbiasa membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMP;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon suaminya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Calon suami anak para Pemohon:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), umur 19 tahun 8 bulan, agama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Anak II;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan anak para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 4 (empat) minggu;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah SD;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sanggup menjadi suami yang baik;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada anak para Pemohon setelah menikah;
Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Junaydi tertanggal 02 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. - tertanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Junaydi bin Marsini dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tertanggal 20 Juli 2002. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor - an. Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 07 April 2021. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 11 Maret 2014. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;

6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an., - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 30 Desember 2011. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;
7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor - an. Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kepahiang, tertanggal 16 Juni 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor - pada tanggal 16 Agustus 2024 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8) dan diparaf;
9. Dokumen elektronik dengan format Pdf Surat Keterangan Hamil Nomor - an. Anak II yang dikeluarkan oleh Puskesmas - tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.9) dan diparaf;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., hal mana para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari anaknya yang bernama Anak II, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Anak II berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat dengan calon suaminya sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II), terbukti jika Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Nikah dan KK para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan antara Para Pemohon dan anak Para Pemohon terdapat hubungan kekeluargaan, dimana Pemohon I sebagai suami, Pemohon II sebagai istri, sedangkan Anak II sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak II lahir di Muara Kalangan, tanggal 12 Juli 2007, anak kedua dari pasangan suami istri Junaydi dengan Leli Sumarni, yang pada saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) lahir di Peraduan Binjai, tanggal 29 Desember 2004, anak kedua dari pasangan suami istri Effendi dengan Ariani, yang pada saat ini berusia 19 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi ijazah SMP anak para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah lulus SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang), yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama -

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Hamil), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak II lahir di Muara Kalangan, tanggal 12 Juli 2007;
- Bahwa, para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak II dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa, anak para Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan telah sedemikian erat bahkan anak para Pemohon telah hamil akibat hubungan diluar perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Anak II dan Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para pemohon telah siap untuk menjadi istri dan dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para pemohon yang bernama Anak II dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph



Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sedemikian erat dikarenakan dalam fakta di persidangan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan dan saat ini anak para Pemohon dalam kondisi hamil, namun nantinya dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua anak itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh para Pemohon bahkan sebagai bentuk dukungan para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua anak tersebut, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, hal itu telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan*

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak yang bernama Anak II untuk menikah dengan Calon suami Anak II (Pemohon I dan Pemohon II);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dhanialifia, S.H., M.H., sebagai Hakim, dengan dihadiri oleh Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Dhanialifia, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp. 60.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp. 0,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Kph